

**STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DALAM  
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KALIMANTAN TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah**



Oleh

**I PUTU IRSAL MAULANA**

**NIM. 1604120517**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN AJARAN 2022**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL** : STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN  
PAJAK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KALIMANTAN TENGAH

**NAMA** : I PUTU IRSAL MAULANA

**NIM** : 1604120517

**JURUSAN** : EKONOMI ISLAM

**PROGRAM STUDI** : EKONOMI SYARIAH

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 14 Januari 2022

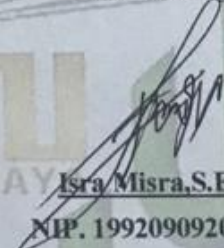
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Enriko tedja Sukmana, S.Th.L., M.Si

NIP. 198403212011011012

  
Isra Misra, S.E., M.Si

NIP. 199209092019031009

Mengetahui:

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP. 196311091992031004

  
Enriko Tedja Sukmana, S. Th.L., M.si.

NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara I PUTU IRSAL MAULANA**

Palangka Raya, 14 Januari 2022

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**  
Di -

Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:


Nama : **I PUTU IRSAL MAULANA**  
NIM : **1604120517**  
Judul Skripsi : **STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK  
DAERAH DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN  
TENGAH**

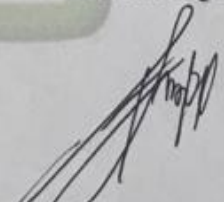
Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Enriko Tedja Sukmana, S. Th.L., M.si.**  
NIP.198403212011011012

  
**Isra Misra, S.E., M.Si**  
NIP.199209092019031009

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH**, oleh **I Putu Irsal Maulana**, NIM. **1604120517**, telah di munaqasahkan Tim Munaqaasah Skripsi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Januari 2022

Palangka Raya, 14 Januari 2022

### Tim Penguji

1. **Sofvan Hakim, M.M** (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Ali Sadikin, M.Si** (.....)  
Penguji Utama / I
3. **Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L., M.Si** (.....)  
Penguji II
4. **Isra Misra, S.E., M.Si** (.....)  
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya

**Dr.Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si**  
NIP.196311091992031004

# **STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH**

## **ABSTRAK**

**Oleh I Putu Irsal Maulana**

Pembangunan Daerah sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang di miliki pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali, mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan didukung regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan menyempurnakan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, dan pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan dan pencapaian target.

Sumber- sumber pendapatan pajak daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bisa Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB, Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Untuk sumber retribusi terdiri dari retribusi pelayanan pada RSJ Kalawa Atei dan laboratorium Kesehatan dan kalibrasi Kalimantan Tengah, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan Pendidikan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fiel dresearch*) menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun subjek penelitian yaitu orang, tempat, benda, Lembaga atupun organisasi. Teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling*. Teknik pengabsahan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat regulasi yang berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah. melakukan pendekatan sosial, memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti PKB dan BBN-KN,PAP,PBB-KB dan pajak rokok. Penyediaan lapangan kerja hal ini dilakukan aga masyarakat memiliki pendapatan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan. Kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Peningkatan layanan umum masyarakat melalui kesehatan, pendidikan dan sosial.

Kata Kunci : Strategi, Optimalisasi, Pajak Daerah, Kesejahteraan Masyarakat

**STRATEGY FOR OPTIMIZATION OF LOCAL TAX REVENUE IN  
REALIZING THE WELFARE OF THE COMMUNITY OF CENTRAL  
KALIMANTAN**

**ABSTRACT**

**By I Putu Irsal Maulana**

Regional development is closely related to the ability of regional financing and the availability of facilities and infrastructure owned by regional governments to realize community welfare. The strategy of the regional government of Central Kalimantan Province in order to spur and accelerate development for the welfare of the community by exploring and developing sources of regional income supported by regulations, institutions and apparatus resources, facilities and infrastructure by perfecting systems based on effective information technology, and developing cooperation between regions for security and target achievement.

The sources of local tax revenue are through Motorized Vehicle Tax (PKB), Motorized Vehicle Transfers (BBNKB), Motor Vehicle Fuel Tax (PBB-KB, Surface Water Tax (PAP), and cigarette tax. The sources of retribution consist of levies services at the Kalawa Atei Hospital and Central Kalimantan Health and calibration laboratories, retribution for map printing costs and education service fees.

This research is a type of *field research* using a qualitative approach. The research subjects are people, places, objects, institutions or organizations. The data collection technique is *purposive sampling*. The data validation technique used interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that local taxes are able to encourage people's welfare by strengthening regulations related to optimizing local taxes. take a social approach, maximize efforts to increase income from taxes, such as PKB and BBN-KN, PAP, PBB-KB and cigarette taxes. The provision of employment opportunities is done so that the community has a steady income to meet their daily needs, the community is able to turn the wheels of the economy which in turn is able to increase the amount of income. Business conditions and other economic factors. Improving public services through health, education and social services.

Keywords: Strategy, Optimization, Local Tax, Community Welfare

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kami memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan sripsi yang berjudul **“STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH”** dengan lancar. Shalawat dan salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakandemi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.  
Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Sadiani, M.H. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memotivasi dan selalu memberi semangat kepada peneliti agar selesai kuliah tepat waktu bahkan kurang dari 5 tahun.

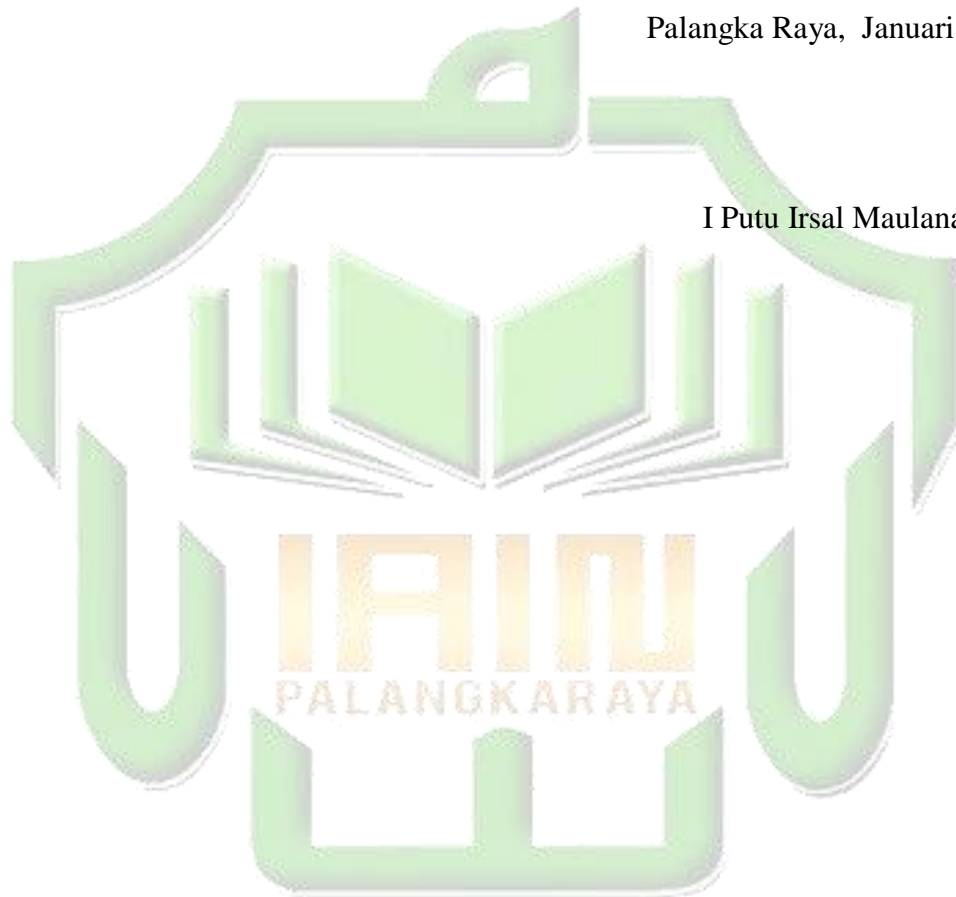
3. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam menunjukkan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
4. Bapak Enrico Tedja Sukmana, S.Th.,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam menunjukkan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
5. Bapak Isra Misra, SE.,M.Si. Selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Palangka Raya yang tidak bias peneliti sebut satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Januari 2022

I Putu Irsal Maulana



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Januari 2022

Peneliti,  
  
A 10000 stamp with the Garuda emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and 'CCFDCAJX28585961' is placed over the signature.

**I PUTU IRSAL MAULANA**  
**NIM. 1604120517**

**MOTTO**

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

“ Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

QS. Al-Maidah (5):2



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ♥ Kedua orang tua serta Adik : Ayahanda I Nengah Marsika dan Ibunda Norhani serta Adik I Made Irham Muhammad yang saya cintai dan sayangi, yang selalu berdo'a dan memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatiannya serta sabar dalam mendidik dan mendukung saya.
- ♥ Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang saya hormati, yang selama ini mendidik, mengajar dan membagi ilmu pengetahuannya kepada saya, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya.
- ♥ Isteriku Adelina Safitri, S.E dan anakku Putu Airin Alisha Putri yang selalu setia menemani saya dimasa sulit dan senang. Terimakasih untuk doa dukungan motivasi semangat dan pengorbanannya.
- ♥ Sahabatku Arif Rahman, Najib Maulana Sidik, Bayu, yang saya cintai dan sayangi, yang telah menemani saya dalam suka maupun duka, sedih senang bahkan banyak kenangan yang tiidak bakal aku lupain yang kita buat selama perkuliahan hamper 5 tahun ini.
- ♥ Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2016, yang saya cintai dan sayangi, yang dengan sabar dan tulus memberikan do'a, perhatian, motivasi, dorongan, bantuan serta dukungan kepada saya.
- ♥ Kepada kampus tercinta IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan memperoleh pengalaman menyenangkan.

“ TERIMA KASIH “

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkam	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z'	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sā'd	ṣ	es titik di bawah
ض	Dā'd	ḍ	de titik di bawah
ط	Ta'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā''	F	Ef

ق	Qā'f	Q	Qi
ك	Kā'f	K	Ka
ل	Lā'm	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta' āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jīzyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakt, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

_ َ _	Fathah	Ditulis	A
_ ِ _	Kasrah	Ditulis	I
_ ُ _	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal panjang**

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يَسْعِي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مَجِيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

**F. Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wāwu mati	ditulis	Au
قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teoritik .....	18
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	18
2. Kesejahteraan Masyarakat .....	40
C. Kerangka Pikir.....	54
<b>BAB III</b> .....	<b>65</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>65</b>
A. Hasil Penelitian .....	65
B. Pembahasan.....	101

<b>BAB IV .....</b>	<b>109</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>



## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	17-18
2.2 Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.....	64-65
2.3 Perkembangan Target Dan Realisasi Pad Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2008 sampai dengan 2017 .....	67
2.4 Peranan Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2009 s.d 2017 .....	68
2.5 Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2018 .....	69



## DAFTAR GAMBAR

2.2 Kerangka Pikir .....55


4.1 Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomr 2 Tahun 2018

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Tengah .....63



**DAFTAR SINGKATAN**

xxi



PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBD	: Anggaran Pembangunan Belanja Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
BPS	: Biro Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional
PKB	: Pajak Kendaraan Berotor
BBN-KB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
UPTB	: Unit Pelaksana Teknis Badan
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
PBB	: Pajak Bumi Dan Bangunan
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
PAP	: Pajak Air Permukaan
RSJ	: Rumah Sakit Jiwa
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

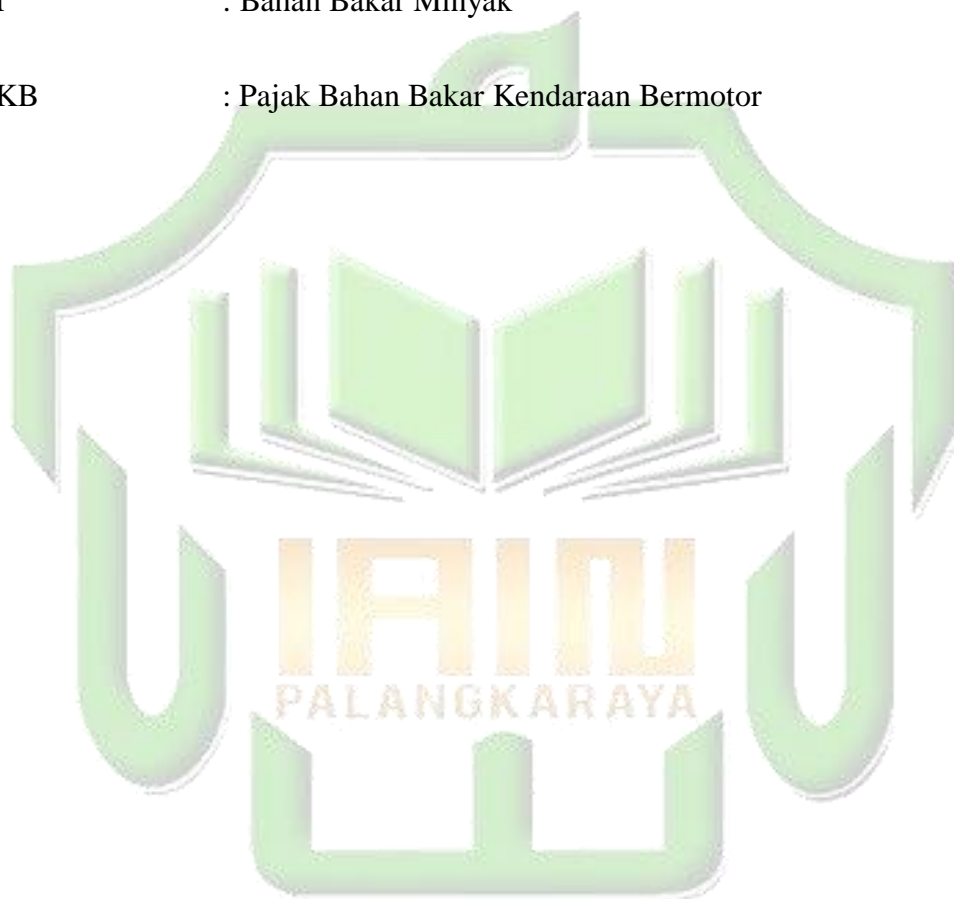
DISPENDA : Dinas Pendapatan Daerah

UPTPPD : Unit Pelaksana <sup>xxii</sup> s Pelayanan Pendapatan Daerah

SDM : Sumber Daya Man

BBM : Bahan Bakar Minyak

PBBKB : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu dan mempercepat pembangunan daerahnya adalah merupakan bagian strategi pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan Daerah sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang merupakan bagian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari laporan tersebut dapat terlihat bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah apakah sudah memenuhi kriteria efektif dan efisien (skala ekonomi).<sup>1</sup> Sejak diberlakukannya sistem pemerintah yang bersifat desentralisasi pada era otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang keuangan pembangunan daerahnya.

Keadaan ini memacu setiap daerah dapat dengan jeli mencari dan melihat peluang untuk dapat meningkatkan pendapatannya tanpa berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memahami dengan benar tentang pajak dan redistribusi daerah, pemerintah daerah

---

<sup>1</sup>Halim, Abdul, 2001. *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada h.36

harus mampu menghitung besarnya tarif dan sistem penetapan yang tepat, bagaimana prosedur pemungutannya, dapat menghitung potensi pajak dan retribusi yang tersedia di daerahnya dan mengoptimalkan penggunaannya secara ekonomis ( efisien dan efektifitasnya ), dan juga titik kritis dalam sistem prosedur pemungutan pajak diperlukan untuk dapat membantu melihat peluang yang lebih progresif.

Terdapat beberapa hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini yaitu upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada saat ini, daerah sudah diberi kewenangan yang bulat dan utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Selain azas manfaat dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut tanggung jawab dan konsekuensi dari pemberian hak dan wewenang otonomi kepada Kepala Daerah tersebut, setiap daerah wajib meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sesungguhnya adalah terjadinya transfer kewenangan yaitu dari pemerintahan yang lebih tinggi pada pemerintahan dibawahnya



(daerah), transfer kewenangan juga mesti diiringi transfer pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Transfer kewenangan didalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal apa yang disebut 3P (personel, peralatan, dan pembiayaan) secara bersama-sama meski dilimpahkan ke daerah, atau dengan kata lain bukan hanya dana (pembiayaan) dan asset (peralatan).<sup>2</sup> tetapi pegawainya pun meski diterima oleh daerah. Sejalan dengan meningkatnya peran daerah dan berkurangnya fungsi pusat secara drastis, pegawai pusat tersebut diserahkan kepada daerah. Dengan demikian besarnya pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah. Sumber pembiayaan pembangunan daerah selain dana perimbangan adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun sumber ini pada semua daerah otonomi di Indonesia belum mampu menjamin pelaksanaan pembiayaan daerah.

PAD merupakan pos terbesar kedua setelah dana perimbangan dalam kerangka Pendapatan Daerah. Penguatan PAD terus diupayakan setiap tahunnya melalui program/kegiatan strategis. Hal ini untuk meningkatkan kemandirian daerah Kalimantan Tengah namun tanpa melepaskan peranan pemerintah pusat (yang melalui Dana Perimbangan) dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

---

<sup>2</sup>Robert A Simanjuntak, *Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, dalam buku Sidik, Machfud (Eds Kompas) h.13

Dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah harus didukung dengan regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan penyempurnaan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan pencapaian target, minimalisasi praktek-praktek yang berakibat terhadap kebocoran potensi daerah dan kerugian terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang efektif dibutuhkan perencanaan strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), kesesuaian kebijakan, pengalokasian sumber daya dan pendanaannya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Dengan adanya regulasi berupa Perda dan Pergub yang mengatur tentang pendapatan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peluang untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru lebih terbuka, walaupun secara substansial masih ada pembatasan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi utama yang dimiliki daerah.<sup>3</sup>

Dalam mencari alternatif pengembangan Pendapatan Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya menemukan potensi-potensi

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 3

baru yang sesuai dengan kondisi daerah, terlebih lagi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang tengah berkembang dengan mobilitas modal dan penduduk yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka panjang peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan akan semakin signifikan. Pendapatan daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 telah mengalami penguatan kenaikan yang terus meningkat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah ?
2. Apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah agar para pembaca dapat memahami pembahasan mengenai:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

2. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Digunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis secara empiris tentang Realisasi Pajak Daerah di Kalimantan Tengah.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi almamater sebagai pengembangan keilmuan.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menambah pengetahuan juga sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini sehingga kekurangan yang ada dalam penelitian lebih sempurna.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field research* ) yang disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian.

### 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam mewujudkan Kalteng BERKAH di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah mendapat ijin penelitian dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palangkaraya diterbitkan dan penyelenggaraan seminar, sehingga data yang diinginkan terkumpul sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya penulis akan berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>4</sup> Dalam Penelitian ini, data-data akan dikumpulkan melalui tiga sumber, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari informan penelitian sebagai data primer. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian, dimulai dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah dilanjutkan dengan Staff Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Secara umum wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan informan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara (*guid line interview*) yang digunakan sebagai

---

<sup>4</sup>Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, h. 143

<sup>5</sup>*Ibid*, 144

kontrol dalam alur pembicaraan. Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian tentang waktu yang dapat digunakan peneliti untuk melangsungkan wawancara. Hal ini dilakukan agar aktivitas informan tidak terganggu dan peneliti memiliki keleluasaan waktu untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Keseluruhan wawancara kecuali anggota masyarakat dilakukan di ruang kerja informan yang bersangkutan.

Wawancara diawali peneliti dengan membuka pembicaraan, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera didalam panduan wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pedoman wawancara sebagai tanggapan atas jawaban informan yang menurut peneliti perlu dijelaskan lebih lanjut. Disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan yang telah diperoleh dari data dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan sistematis mengenai objek yang ada di wilayah penelitian, seperti aspek sosial, teknologi, fisik alami, dan kondisi-kondisi lingkungan lainnya di sekitar objek penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk mengetahui penerimaan pendapatan pajak daerah, Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah.

Setelah melalui prosedur membawa surat ijin dari Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkannya kebagian umum dan kepegawaian untuk mendapatkan disposisi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Usman dan Purnomo, keuntungan menggunakan teknik dokumentasi ini ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data sekunder berupa dokumentasi internal dan eksternal.<sup>6</sup>

Data internal yang diperoleh peneliti selama penelitian antara lain data yang berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2018 berisikan ada jumlah dan kondisi geografis, keadaan ekonomi, sosial dan potensi Provinsi Kalimantan Tengah, data

---

<sup>6</sup>Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 56



laporan kinerja bulanan tahun 2018 yang berisi keadaan umum, tugas pokok dan fungsi, visi misi serta data-data kepegawaian Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, peneliti juga memperoleh data tentang Ketentuan Umum Penerimaan dan Pendapatan Pajak Daerah. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut peneliti meminta secara langsung kepada informan yang diwawancarai untuk menguatkan keterangan-keterangan yang informan sampaikan kepada peneliti. Sebagian dokumen tersebut juga diberikan secara langsung oleh informan ketika proses wawancara berlangsung baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

Peneliti juga mengumpulkan dokumen eksternal dengan melakukan pencarian (*searching*) berita-berita yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan pajak kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

## **G. Sistematika Penulisan**

- BAB I pendahuluan ,dalam bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ,manfaat dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II kajian pustaka, dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga meliputi penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
- Bab III metode penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pengolah dan analisis data.
- Bab IV Hasil penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan hasil-hasil penelitian baik dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dituangkan dalam analisis hasil penelitian yang kemudian di konfrontasi dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu.
- Bab V Kesimpulan dan saran, bab ini akan menampilkan kesimpulan dari beberapa hasil penelitian yang merupakan temuan peneliti, selain itu akan dibuat rekomendasi dari hasil penelitian berupa saran-saran yang membangun sehingga penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa lain dalam sebuah skripsi yang pembahasannya memiliki kaitan atau kemiripan dalam pembahasan proposal skripsi yang sedang penulis teliti ini. Untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, maka perlu adanya pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sebagai berikut.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Firman Ramdhani. Peneliti mengangkat judul “Analisis Administrasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi).<sup>7</sup> Tesis tersebut mendeskripsikan dan membahas penyelenggaraan administrasi pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang dibahas oleh peneliti mengenai pelaksanaan administrasi pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi serta factor pendukung dan penghambatnya. Hasil analisis data menunjukkan pelaksanaan administrasi pajak daerah masih belum optimal

---

<sup>7</sup>FirmanRamdhani, Analisa Administrasi Pendapatan Asli Daerah DalamPengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi), (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, bahan tidak diterbitkan, 2003)

karena masih ditemukan penunggakan pajak sebanyak 364 kasus. Faktor-faktor yang mendukung adalah factor peraturan perundang- undangan dan peraturan daerah Kabupaten Bekasi, Faktor sumber daya manusia dan factor sebagai daerah perindustrian, perdagangan dan permukiman. Penelitian berikutnya mengenai pendapatan asli daerah dilakukan oleh Rd. Dade Kusuma dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 1997/1998–2002”.<sup>8</sup> Penelitian ini mengangkat permasalahan seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang serta faktor-faktorapa yang berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa, pertama, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang dengan catatan perlu terus dioptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber keuangan Kabupaten tersebut. Kedua Penkajian mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah dengan tagihan-tagihan kecil yang dilakukan berulang-ulang karena menimbulkan sikap ke enggan membayar pada pihak Pemerintah Daerah.

Keuangan serta pemerintah Kabupaten Tangerang serta perlunya dilakukan

---

<sup>8</sup>Raden Dade Kusuma, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 1997/1998-2002, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, bahan tidak diterbitkan, 2004)

identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi asset daerah. Menurutnya hal ini perlu agar pemerintah Kabupaten memiliki informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah Kabupaten Tangerang. Penelitian yang pertama menganalisa mengenai administrasi pajak di Kabupaten Bekasi sedangkan penelitian saya mendeskripsikan strategi dan optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam mewujudkan Kalteng Berkah. Perbedaan penelitian yang kedua terletak pada lokus penelitian dan pokok permasalahannya. Penelitian saya mengambil lokus penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aris Munandar dengan judul “Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aspek Pajak Kendaraan Bermotor (studi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)”<sup>9</sup> Yang membedakan dengan peneliti pertama dan kedua adalah pada lokus dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maharani Tirta Sari (2018)<sup>10</sup> dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung” (Studi pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung) dengan hasil dalam meningkatkan PAD melalui aspek Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup berjalan efektif, Dinas

---

<sup>9</sup> Aris Munandar, Strategi Dinas Pendapat Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Aspek Pajak Kendaraan Bermotor (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, bahan tidak diterbitkan, 2012)

<sup>10</sup> Maharani Tirta Sari, Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan PAD di Provinsi Lampung (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018)

Pendapatan Provinsi Jawa Timur prosktif berkerja sama dengan pihak Kepolisian untuk mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak, rutin menggelar operasi bersama dalam rangka member kesadaran kepada masyarakat selaku wajib pajak. Peneliti Juwita Sari<sup>11</sup>, dengan judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat” (studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju), dengan hasil mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan dan mengoptimalkan potensi pajak daerah, meningkatkan *Skill* petugas pajak, membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan pendataan wajib pajak, dan penagihan pajak serta Peraturan Daerah (Perda). Dari kelima peneliti tersebut hamper memiliki kesamaan yang peneliti lakukan namun perbedaan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rd. Dade Kusuma (2004), Firman Ramdhani (2003), Aris Munandar (2012), Maharani Tirta Sari (2018) dan Juwita Sari (2018) keseluruhan adalah pada 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti 2) subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu menggunakan total populasi sedangkan penelitian menggunakan sumber informasi langsung di lapangan yang telah ditentukan 3) Indikator yang dipakaisebagai instrument penelitian (kisi-kisi) kuesioner tidak sama dengan peneliti gunakan 4) instrument penelitian menggunakan kuesionerse dangkan penelitian menggunakan teknik

---

<sup>11</sup>Juwita Sari, StrategiPeningkatanPenerimaanPajak Daerah di KabupatenMamuju (Skripsi, FakultasIlmu Sosial dan IlmuPolitikUniversitasMamuju, 2018)

pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi yang peneliti gunakan adalah penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumenresmilainnya, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Firman Ramdhani	Analisis Administrasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Darerah Kabupaten Bekasi).Tahun 2003	Analisis data menunjuk kan pelaksanaan administrasi pajak daerah masih belum optimal karena masih ditemukan penunggakan pajak sebanyak 364 kasus
Rd. Dade Kusuma	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang TA. 1997/1998 – 2002 Tahun 2004	pertama, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah memberik kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang dengan catatan perlu terus dioptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber keuangan Kabupaten tersebut. Kedua Pengkajian mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah dengan tagihan-tagihan kecil yang dilakukan berulang – ulang karena menimbulkan sikap keengganan membayar pada pihak Pemerintah Daerah.
Aris Munandar	Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aspek Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur). Tahun 2012	Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan PAD melalui aspek Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup berjalan efektif, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur prosktif berkerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak, rutin menggelar operasi Bersama dalam rangka member kesadaran kepada masyarakat selaku wajib pajak.
Maharani Tirta Sari	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung (Studi pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung). Tahun 2018	Optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sudah dilaksanakan secara maksimal, antarlain : a. Dari segi pendapatan potensi pajak upaya yang dilakukan adalah Dinas Pendapatan Prov.Lampung telah memiliki database yang lengkap mengenai

		<p>subjek pajak dan objek pajak serta terus berupaya menggali pajak<sup>2</sup> yang belum <i>tercover</i></p> <p>b. Dari segi pengawasan ,telah membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan pungli yang diberi nama Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau disingkat Saber Pungli.</p> <p>c. Dari segi koordinasi, telah melakukan perasional lapangan / Razia, penyegelan, pemeriksaan serta pembongkaran barang terhadap sarana pengangkutan, melakukan patrol rutin dan operasi yang melibatkan Polda Lampung, Kantor Pos, Bea dan Cukai, UPTD, DinasPertambangan dan Energi, Dinas DLH, dan Satpol PP.</p> <p>d. Penyuluhan dan sosialisasi, antara lain memasang spanduk, menyebarkan brosur -brostur, pamflet, memasang iklan di media massa, cetak dan elektronik dan rutin melaksanakan Raker Tim IntensifikasiPajak.</p> <p>e. Dari segi strategi pemungutan, dengan membuat terobosan Samsat <i>Drive THRU</i>/Unit Pelayanan Cepat (UPC), Samsat<i>link</i>, Samsat keliling dan Samsat <i>Delivery</i>.</p>
Juwita Sari	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (studi pada Badan Pendapatan Daerah KabupatenMamuju). Tahun 2018	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, adalah mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan dan mengoptimalkan potensi pajak daerah, meningkatkan <i>Skill</i> petugas pajak, membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan pendataan wajib pajak, dan penagihan pajak sertaPeraturan Daerah (Perda).

Sumber : diolah peneliti

## B. Kajian Teoritik

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai



perwujudan asas desentralisasi.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>13</sup>

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelacaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

---

<sup>12</sup>Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011, h.99

<sup>13</sup>*Undang-Undang Pajak Lengkap* Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011, h.382

## **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:<sup>14</sup>

### **1) Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>15</sup> Jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari:

---

<sup>14</sup>Yuliati, *Akutansi sektor public cetakan kelima*, salemba empat, Jakarta, 2000, h. 97

<sup>15</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 393

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>16</sup>

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotik, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terja diantara pemerintahan daerah sebagai fiskus

---

<sup>16</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Pemerintah Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, h.24

dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga /catering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelanan penjualan makanan/minuman yang dikondisikan oleh pembeli/ atau layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.<sup>17</sup>

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan

---

<sup>17</sup>*Ibid.h.25*

hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>18</sup> Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajaka adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang di distribusikan

---

<sup>18</sup> Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha, Yogyakarta, 2011. h.87

dari penyediaan tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

- f) Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat
- g) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- h) Pajak Rokok

## 2) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup> Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 90

a) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

(1) Perijinan Tertentu

Objek retribusi perijinan tertentu adalah pelayanan perijinan oleh Pemda kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau kelestarian lingkungan.

(2) Perusahaan Daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produk untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.<sup>20</sup>

Prinsip pengolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan

---

<sup>20</sup>Supriatna, *system administrasi pemerintahan di daerah*, PT Bumi Aksara, Jakarta 1993, h.195

kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang



didapati inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

b) Retribusi Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana serta kelestarian lingkungan.

c) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau berikan pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>21</sup>

### c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah, Lain-lain usaha daerah yang merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.<sup>22</sup>

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam

<sup>21</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, h. 16

<sup>22</sup> Supriatna, *sistem administrasi pemerintahan di daerah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993,

memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.<sup>23</sup>

#### **d. Pendapatan Negara Dalam Islam**

Pendapatan Asli Daerah atau Negara dalam islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari *fay'i*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, (beacukai), Negara berhak mempelajari unruk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Islam, yaitu :

##### 1) *Fay'i*

Hukum *fay'i* berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum *fay'i* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh

---

<sup>23</sup>Ibid, h.20

tanpa peperangan. *Fay'i* disebut pendapaatan penuh Negara karena Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat.<sup>24</sup>

## 2) *Jizyah*

*Jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi *jizyah* tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Taubahayat 29.

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ  
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kita, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.<sup>25</sup>

*Jizyah* dikenakan atas diri sendiri setiap orang kafir, bukan atas harga mereka. *Jizyah* juga tidak gugur dari mereka, sekali pun mereka ikut terlibat dalam perang. *Jizyah* merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil

<sup>24</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2001, h.105

<sup>25</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah

setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. *Jizyah* termasuk *fay'I* di distribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak.

### 3) *Kaharaj*

*Kaharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah taklukkan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

Artinya: *Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu adalah lebih baik, karena Dia Pemberi rezeki yang terbaik.*<sup>26</sup>

*Kaharaj* dikenakan atas orang kafir dan juga muslim dan *kharaaj* dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslim ataupun non muslim.<sup>27</sup> Hasil pengenaan *kharaaj* didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslim disetiap masa.

### 4) *Ushr* (Bea Cukai)

<sup>26</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah Mu'minun Ayat 72 Terbitan Al-Qur'an Ku DenganTajwid Blok Warna Disertai Terjemah

<sup>27</sup>Gusfahmi, *Op, Cit*,h.109

Di kalangan *anahlifiqih* 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek beacukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah peradaban islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka *ushr* digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas.<sup>28</sup>

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaiman yang telah diketahui, tujuan ekonomi islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimasi masalah.

Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintahan di dalam mengoptimalkan *falah* yaitu :<sup>29</sup>

- a) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik.
- b) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun Negara yang secara efektif tidak melindungi masyarakat dan kepentingan budaya.
- c) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h.114

<sup>29</sup>*Ibid*, h.460

tugas- tugas pemerintah.

- d) Menjamin individu agar dapat meningkatkan efisiensi derajat kekayaan dan kesejahteraan.
- e) Menjaga keseimbangan social ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan.
- f) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan pendapatan Negara.

5) Harus ada *nash* yang memerintahkan

Setiap pendapatan dalam Negara islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara" dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara.

6) Harus ada pemisah muslim dan non muslim

Islam membedakan antara objek zakat dan pajak muslim dengan non muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim.

7) Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul bebanutama.

8) Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Prinsip kebijakan pemerintah Negara keempat adalah adanya tuntunan kemaslahatan umum, yang didahulukan untuk mencegah

kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat).Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi.

#### 9) Pemanfaatan Potensi Daerah

Berdasarkan beberapa potensi daerah yang telah dijelaskan, baik dari potensi sumber daya alam, sosial budaya dan sumber daya manusia.Semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk kegiatan ekonomi. Pemanfaatan potensi seperti yang terdapat ditempat penelitian terutama pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi tersebut dapat di bagi menjadi bidang, yaitu sebagai berikut.<sup>30</sup>

##### a) Bidang pertanian

Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah yang subur di dataran rendah. Dalam Q.S Al-An'am ayat 141 dijelaskan tentang Sumber Daya Alam terutama di bidang perkebunan dengan Firmannya:

---

<sup>30</sup>Viethzalrivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Raja Grafindo, Jakarta Persada, Jakarta, 2011, h.6



وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
 وَالرُّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَشِبِهِ ۖ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  
 تُسْرِفُوا ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>31</sup>

#### b) Bidang perkebunan

Usaha perkebunan dapat dilakukan didataran tinggi maupun dataran rendah. Indonesia merupakan daerah yang potensial untuk usaha perkebunan karena tanahnya yang subur. Dalam Q.S An-Nah layat 10 itu sendiri diingatkan tentang kekayaan flora dan fauna dengan firmanNya:

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Artinya: Dia-lah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu.<sup>32</sup>

Tafsirannya menjelaskan bahwa dia-lah (Allah) yang menumbuh kembangkan, membesartinggikan berbagai pepohonan dan tanaman yang ada di berbagai lading dan kebun, baik itu

<sup>31</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 141 Terbitan Al-Qur'an Ku DenganTajuid Blok WarnaDisertaiTerjemah

<sup>32</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 10 Terbitan Al-Qur'an Ku DenganTajuid Blok WarnaDisertaiTerjemah

pepohonan dan tanaman yang tumbuh dengan merambat seperti pepohonan semangka, labu, mentimun, dan lain-lain. Maupuntanaman yang meninggi dan membesar seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon jati, dan lain-lain.<sup>33</sup> Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggi antara lain teh, kopi, cengkeh dll. Sedangkan tanaman yang cocok untuk perkebunan didataran rendah antara lain kelapa, tembakau, papaya.

c) Bidang peternakan

Usaha peternakan haruslah memperhatikan lokasi yang tepat untuk mengembala ternaknya. Mengembala artinya mencari tempat untuk merumput atau makan binatang ternak. Daerah padang rumput sangat potensial untuk usaha peternakan sapi dan kambing. Dalam Al-Quran mengingatkan tentang kekayaan alam dalam bentuknya yang bermacam-macam, dalam Q.S An-Nahl ayat 66 mengingatkan tentang kekayaan fauna dan yang dihasilkannya seperti daging, kulit, bulu, Allah berfirman:<sup>34</sup>

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا يَلْشُرِبِينَ

Artinya: *Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapa tpelajaran bagikamu. Kami memberimu minum dari apa*

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah dan Tafsir*, Jakarta, Bumi Aksara, h.91

<sup>34</sup> Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Rabbani Perss*, Jakarta, 2004, h.174

*yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.*<sup>35</sup>

Dalam tafsiran ayat diatas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang telah menciptakan binatang ternak diantaranya unta, kuda, sapi, yang paling sering di sebutkandalam Al-quran, semata-mata untuk kemaslahatan kamu (manusia). Dalam berbagai jenis binatang ternak itu ditemukan beberapa atau bahkan sejumlah (manfaat), di antaranya sebagai sarana penghangat atau pemanas di saat-saat mengalami kedinginan dimusim dingin.

#### d) Bidang perdagangan

Perdagangan adalah usaha yang bermanfaat untuk distribusi dari produsen kekonsumen.<sup>36</sup> Baik distribusi dari barang kotak epedesaan maupun sebaliknya. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan dipasar, keliling swalayan atau membuka toko. Seperti yang di dapat dalam Q.S An-Nisaayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dala perdagangan yang berlaku atas dasar suka*

<sup>35</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 66 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajuid Blok Warna Disertai Terjemah

<sup>36</sup>Viethzalrivai, *Op, Cit*,h.8

*sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>37</sup>

e) Bidang prindustrian

Perindustrian merupakan usaha untuk menghasilkan barang, industry membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. Untuk bahan baku industri memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga biasanya lokasi industri dekat dengan lokasi bahan baku. Namun ada pula industri yang jauh dari lokasi bahan baku sehingga mendatangkan bahan baku dari tempat lain. Industri juga memanfaatkan tenaga manusia untuk proses pengolahan barang, pengoprasian mesin, mengatur perusahaan dan memasarkan barang, untuk itu dibutuhkan tenaga manusia yang cakap, terampil dan terlatih. Teruma di jelaskan dalam Q.S Al-Hadid ayat 25 tentang industry makanan, Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sesungguhnya, kami telah mengutusrasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai Kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah*

<sup>37</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajuid Blok Warna Disertai Terjemah

*Maha kuat Mahaper kasa.*<sup>38</sup>

f) Bidang Pertambangan

Usaha pertumbuhan merupakan usaha dengan memanfaatkan hasil bumi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang seperti pasir ,biji besi, minyak bumi, emas dan gas alam.<sup>39</sup>

Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di darat maupun di 'laut. Seperti yang terdapatdalam Q.S Ar-Ra'dayat 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبٰطِلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰهُبُ جَفَاءً وَّامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

Artinya: Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (tentang) yang benar dan yang bathil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetapi ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.<sup>40</sup>

g) Bidang Pariwisata

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk

<sup>38</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 25 Terbitan Al-Qur'an Ku DenganTajuid Blok Warna Disertai Terjemah

<sup>39</sup>Viethzalrivai, *Op, Cit.* h.11

<sup>40</sup>Kutipanayatdari Al-Qur'an Surah Ar-Ra'dayat 17Terbitan Al-Qur'an Ku dengan tajuid blok warna disertai terjemah

kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat ,rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan membuka wisata-wisata baru. Dengan adanya objek wisata dan yakni mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dibukanya objek wisata juga banyak membuka peluang usaha ditempat wisata, antara lain berdagang souvenir, sewatikal, jasa foto, transportasi dan dll.<sup>41</sup>

## **2. Kesejahteraan Masyarakat**

### **a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal,yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan

---

<sup>41</sup>Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Grafindo, 2010, h.4

masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup.<sup>42</sup> Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai di sirumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif diantaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standar dliving*, *well-being*, *welfare*, dan *qualityoflife*. Dalam kajian ekonomin kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen.<sup>43</sup> Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h.59

<sup>43</sup> Fergusson and Martin, 2006. *Journal of Empirical Finance*, Vol 1, Issue 1, Januari 2004, h. 29-53

merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak).

Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkahlaku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya.<sup>44</sup>

Mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogy pembangunan sejak Repelita III, yaitu:1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3)tingkat pendapatan;4) tingkat pangan, sandang, perumahan;5) tingkat pendidikan dan kesehatan ;6) peranserta ;7) pemerataan antar daerah, desa/kota ; dan 8) kesamaan dalam hukum.<sup>45</sup> Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi

---

<sup>44</sup>Currivan,1999; Lambertetal, 2001; Robbins dan Judge,2007. *Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Models of Employee Turnover. Human Resource Management* .USA Press, h.324

<sup>45</sup>Sayogyo, *Kemiskinan dan ketimpangan Sosial* IPB Press, 1984, h.89



fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang samadan pengelolaan keuangan yang sama,serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan terminology lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai- nilai hidup.<sup>46</sup> Menggunakan istilah kesehatan social keluarga dan kesejahteraan social keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>BubolzdanSontag, *argue that Richards's vision of a scientifically based, family consumption unit missed the fact that family decisions ultimately reflect.* USA Press, 1993, h. 56-57

Pengertian kesejahteraan social merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.<sup>48</sup>

Perbedaan status social budaya dan spesialis askerja akan menghasilkan kanpersepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada symbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial.<sup>49</sup> Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari

---

<sup>48</sup>Whithaker dan Federico, *Social welfare in Today's World*, Second Edition, 1997, h. 78

<sup>49</sup>Sumarti, *Persepsi Kesejahteraan dan Tindakan Kolektif Orang Jawa*. Sekolah Pascasarjana IPB, 1999, h.78

kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relative baku, seperti menggunakan pendapatan perkapita , dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hamper sama,yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan).

Kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan ke dalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) sub sistem sosial; dan 2) sub sistem ekonomi, dengan beberapa faktor diantaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina *etal.*, 2004). Dinegara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19 indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita ,b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*,

dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat :a) sukarela, b) *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan.<sup>50</sup>

#### **b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>51</sup> Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen ; dan c) nonpermanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan

---

<sup>50</sup> Sharpe, *Journal of Empirical Finance*, Vol 1, Issue 1, January 2004, h. 29-30

<sup>51</sup> Sugiharto, *Faktor-Faktor Resiko Hipertensi Grade II Pada Masyarakat*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, h.152

bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan dana kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan kedalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit.<sup>52</sup>

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Ibid, h. 233

- a) Keluarga prasejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
- b) Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu:
1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
  2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
  3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
  4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
  5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa kesarana/petugas kesehatan;
- c) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu:
6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.

7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
  8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru pertahun.
  9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
  10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
  11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
  12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bias membaca tulisan latin.
  13. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini
  14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);
- d) Keluarga sejahterata tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :
15. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
  16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.

17. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
  18. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
  19. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
  20. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
  21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat;
- e) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi criteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi criteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu :
22. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan social masyarakat dalam bentuk materi.
  23. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat

Terdapat beberapa penelitian menggunakan kesejahteraan sebagai konstruk dengan berbagai definisi dan ragam indikatornya. Penelitian untuk menguji model hipotesis apakah perubahan jaminan pendapatan tambahan dan bantuan umum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan



rumah tangga dengan kepala keluarga wanita. Ukuran kesejahteraan ekonomi menggunakan ukuran pendapatan yang kemudian digunakan dalam menentukan garis kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.<sup>53</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ukuran pendapatan dengan riskemiskinan, kesejahteraan ekonomi dengan kepala keluarga wanita dengan tanggungan anak adalah paling rendah jika dibandingkan dengan tanpa anak.

### **c. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Mardiasmo, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah.<sup>54</sup>

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. menurut brata yang dikutip oleh Adi dan Harianto menyatakan bahwa terdapat dua komponen

---

<sup>53</sup>*Ibid*, 79

<sup>54</sup>Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Erlangga, 2006. h. 497

penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan.

Dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapatan tabungan bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.<sup>55</sup>

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain: pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.
- 2) Retribusi Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari

---

<sup>55</sup>Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, h.87

<sup>56</sup>Abdul Halim, *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta, 2001. h.45

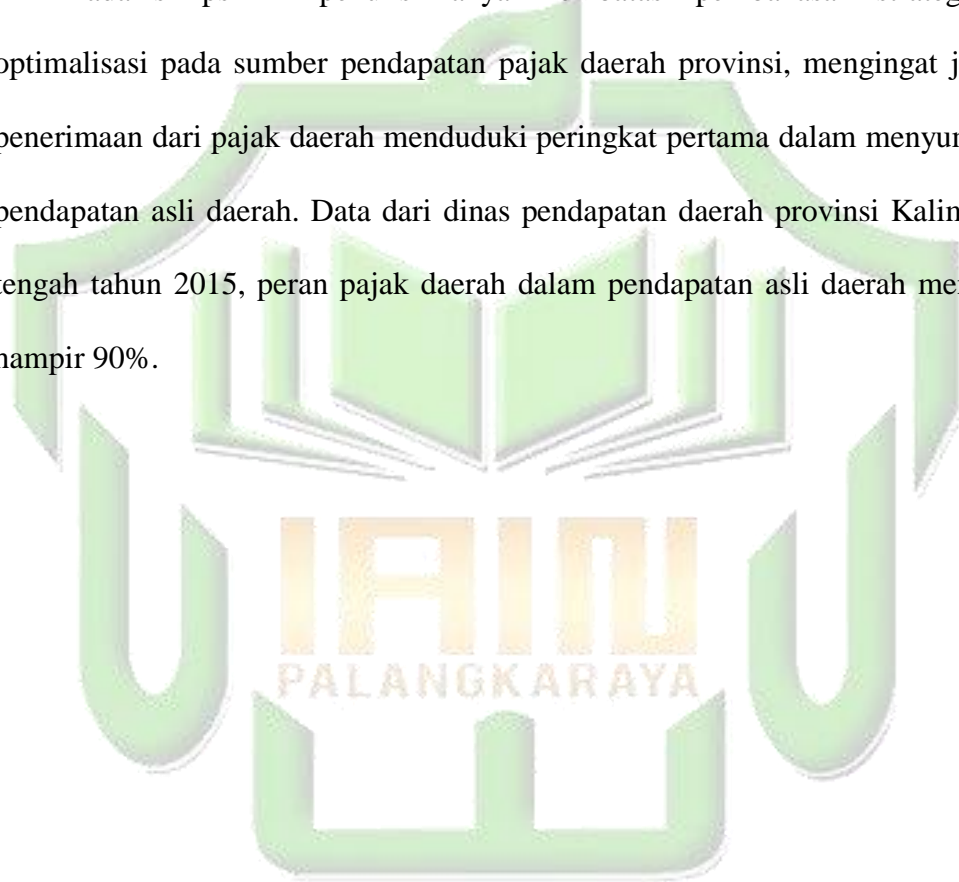
retribusi daerah.

- 3) Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin proyek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.
- 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK.
- 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain –lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam.

### C. Kerangka Pikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada skripsi ini penulis hanya membatasi pembahasan strategi dan optimalisasi pada sumber pendapatan pajak daerah provinsi, mengingat jumlah penerimaan dari pajak daerah menduduki peringkat pertama dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Data dari dinas pendapatan daerah provinsi Kalimantan tengah tahun 2015, peran pajak daerah dalam pendapatan asli daerah mencapai hampir 90%.



Gambar 3.1  
Kerangka Pikir



Sumber : diolah peneliti

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **D. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu untuk melakukan penelitian Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dalam mewujudkan Kalteng BERKAH di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan setelah mendapat ijin penelitian dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palangkaraya diterbitkan dan penyelenggaraan seminar, sehingga data yang diinginkan terkumpul sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selanjutnya penulis akan berusaha mencari data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

#### **E. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian.

#### **F. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, tempat, benda, ataupun lembaga (organisasi). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive*

*sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Dr. Ibrahim, terdapat tiga situasi dalam penggunaan teknik *purposive sampling*, yaitu:

- a. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang akan member informasi penting.
- b. Penelitian menggunakan *purposive sampling* untuk memilih responden yang sulit dicapai, karenanya peneliti cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* ketika penelitian ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara mendalam.

Berdasarkan hal diatas peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria yang diambil oleh peneliti, yang menjadi subjek penelitian dalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi:

- a. Kepala bidang pajak daerah;
- b. Kepala Sub Bidang pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- d. Kepala Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.

- e. Masyarakat yang merasakan dampak PAD terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 2. **Objek penelitian**

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian ini adalah tentang Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>57</sup> Dalam Penelitian ini, data-data akan dikumpulkan melalui tiga sumber, yaitu :

### 1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data-data yang berasal dari informan penelitian sebagai data primer. Wawancara dalam

---

<sup>57</sup>Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, h. 143

<sup>58</sup>*Ibid*, 144



penelitian ini dilakukan secara berjenjang terhadap informan penelitian, dimulai dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah dilanjutkan dengan Staff Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Secara umum wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan informan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara (*guidlineinterview*) yang digunakan sebagai kontrol dalam alur pembicaraan. Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian tentang waktu yang dapat digunakan peneliti untuk melangsungkan wawancara. Hal ini dilakukan agar aktivitas informan tidak terganggu dan peneliti memiliki keleluasaan waktu untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Keseluruhan wawancara kecuali anggota masyarakat dilakukan di ruang kerja informan yang bersangkutan.

Wawancara diawali peneliti dengan membuka pembicaraan, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera didalam panduan wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pedoman wawancara sebagai tanggapan atas jawaban

informan yang menurut peneliti perlu dijelaskan lebih lanjut. Disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara.

## 2. Observasi

Observasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan yang telah diperoleh dari data dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan sistematis mengenai objek yang ada di wilayah penelitian, seperti aspek sosial, teknologi, fisik alami, dan kondisi-kondisi lingkungan lainnya di sekitar objek penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk mengetahui penerimaan pendapatan pajak daerah. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah.

Setelah melalui prosedur membawa surat ijin dari Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah dan menyerahkannya ke bagian umum dan kepegawaian untuk mendapatkan disposisi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng.

## 3. Dookumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Usman dan Purnomo, keuntungan menggunakan teknik dokumentasi ini ialah

biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data sekunder berupa dokumentasi internal dan eksternal.<sup>59</sup>

Data internal yang diperoleh peneliti selama penelitian antara lain data yang berasal dari Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2018 berisikan ada jumlah dan kondisi geografis, keadaan ekonomi, sosial dan potensi Provinsi Kalimantan Tengah, data laporan kinerja bulanan tahun 2018 yang berisi keadaan umum, tugas pokok dan fungsi, visi misi serta data-data kepegawaian Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, peneliti juga memperoleh data tentang Ketentuan Umum Penerimaan dan Pendapatan Pajak Daerah. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut peneliti meminta secara langsung kepada informan yang diwawancarai untuk menguatkan keterangan-keterangan yang informan sampaikan kepada peneliti. Sebagian dokumen tersebut juga diberikan secara langsung oleh informan ketika proses wawancara berlangsung baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

Peneliti juga mengumpulkan dokumen eksternal dengan melakukan pencarian (*searching*) berita-berita yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan pajak kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

---

<sup>59</sup>Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 56

## H. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada dilokasi penelitian. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna.

## I. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip siwawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan kanmenyajikan data yang sudah ditemukan kepada orang lain.<sup>60</sup>

Milles da Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin agar dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.

---

<sup>60</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2011, h. 85

2. *Data Reduction* (Pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan kedalam pembahasan hasil penelitian.
3. *Data Display* (Penyajian data), data yang diperoleh dari kancah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan dan digambarkan apa adanya khususnya tentang pengumpulan data dari sumber sebanyak mungkin oleh peneliti untuk dapat diproses menjadi bahasan penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko.
4. *Conclusion Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu menarik kesimpulan mengenai penerapan manajemen risiko yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau dianalisa. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian secara kongkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemah Tjetjep Rohendi, Jakarta: Universitas Indonesia Perrss, 1999, h. 16-18



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Obyek Penelitian**

###### **a. Profil Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah**

Badan Pendapatan Daerah atau dulu dikenal dengan Dinas Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang berdiri seiring berdirinya Kalimantan Tengah Tahun 1956. Badan Pendapatan Daerah atau biasa disingkat Bapenda merupakan badan yang bertugas untuk melakukan eksekusi terhadap pengelolaan pendapatan daerah khususnya di Wilayah Kalimantan Tengah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai koordinator Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam hal pengelolaan potensi, penetapan target pajak dan retribusi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan memberikan pelayanan yang optimal, tertib



administrasi pungutan, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah harus didukung dengan regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan penyempurnaan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan pencapaian target, minimalisasi praktek-praktek yang berakibat terhadap kebocoran potensi daerah dan kerugian terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang efektif dibutuhkan perencanaan strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), kesesuaian

kebijakan, pengalokasian sumber daya dan pendanaannya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

**b. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan tugas pokoknya tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pendapatan daerah, mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- 3) Menyusun konsep RAPBD di bidang pendapatan daerah.
- 4) Mengatur realokasi PAD yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut.
- 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

- 7) Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan bimtek, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang pendapatan daerah.
- 8) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan.

Terkait tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan fungsi-nya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan dan program teknis di bidang pendapatan daerah.
- 2) Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan daerah.
- 3) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatn daerah.
- 4) Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- 5) Melaksanakan pendataan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
- 6) Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang pendapatan.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, maka dibentuklah Unit Pelaksana

Teknis Badan (UPTB) di 1 (satu) Kota dan 13 (tiga belas) Kabupaten se-Kalimantan Tengah, yakni :

- 1) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 2) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas
- 3) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di PulangPisau
- 4) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Kasongan
- 5) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit
- 6) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun
- 7) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Buntok
- 8) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di TamiangLayang
- 9) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Nanga Bulik
- 10) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Sukamara
- 11) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di PurukCahu
- 12) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh
- 13) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kurun
- 14) UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Seruyan

Struktur organisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris, membawahi:
  - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;

- Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang, terdiri dari :

Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi:

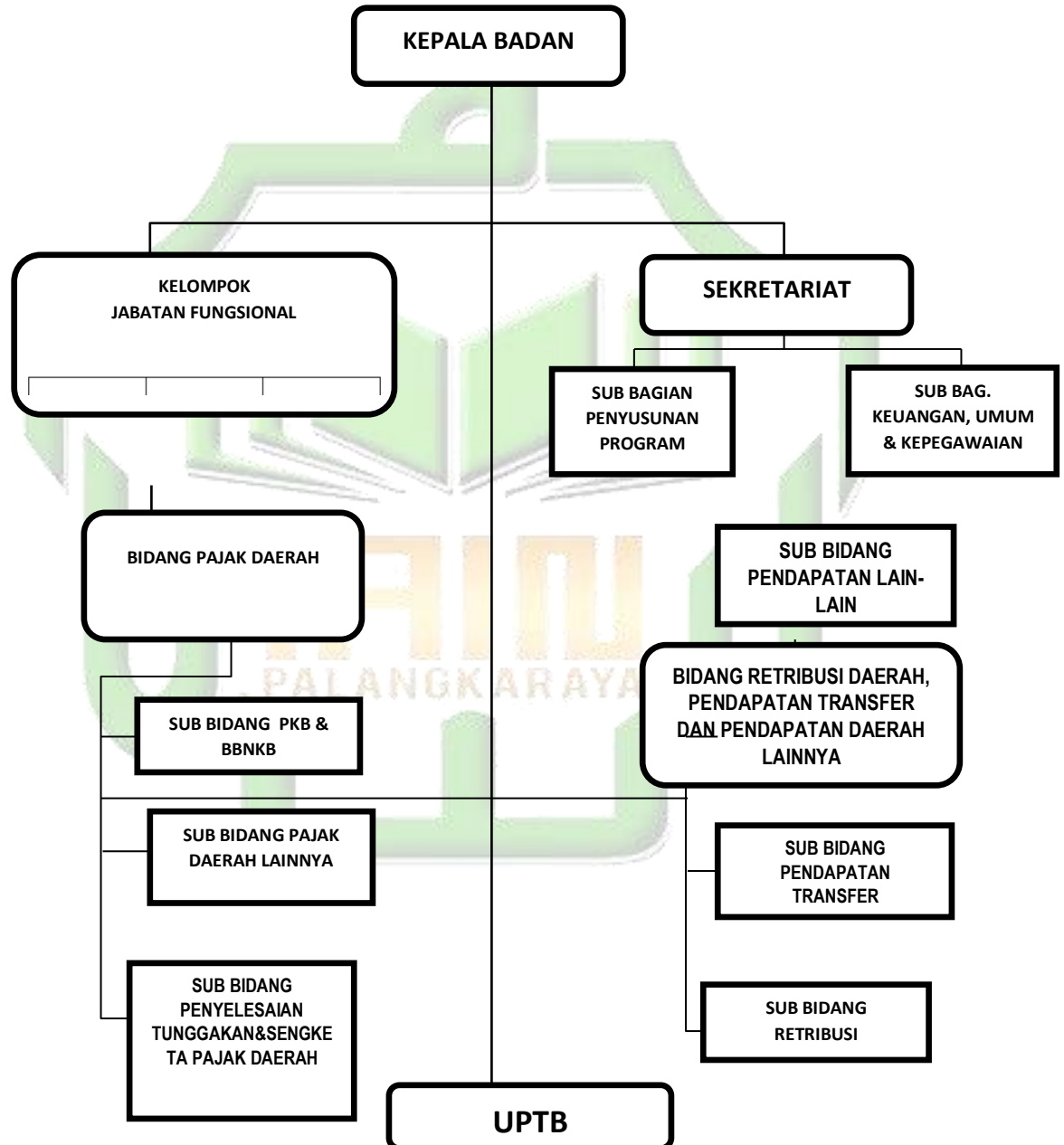
- Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
- Kepala Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.

Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya:

- Kepala Sub Bidang Retribusi
  - Kepala Sub Bidang Pendapatan Transfer
  - Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

GAMBAR 3.2

**Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2  
Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kalimantan Tengah**



c) Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setelah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, tercatat berjumlah 248 orang dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2018**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	PNS/ASN	174 Orang
2	CPNS	- Orang
3	Tenaga Kontrak	74 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>248 Orang</b>

**Menurut tempat tugas :**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalteng	62 Orang
2	UPTB Palangka Raya	18 Orang
3	UPTB Kasongan	8 Orang
4	UPTB Kuala Pembuang	6 Orang
5	UPTB Pangkalan Bun	6 Orang
6	UPTB Nanga Bulik	6 Orang
7	UPTB Sukamara	7 Orang
8	UPTB PulangPisau	7 Orang
9	UPTB Kuala Kapuas	9 Orang
10	UPTB Kuala Pembuang	6 Orang

11	UPTB Tamiang Layang	6 Orang
12	UPTB Buntok	7 Orang
13	UPTB Muara Teweh	9 Orang
14	UPTB Puruk Cahu	6 Orang
15	UPTB Kuala Kurun	8 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>174 Orang</b>

**Menurut Jabatan :**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	EselonII.a	1 Orang
3	EselonIII.a	3 Orang
4	EselonIII.b (UPTPPD)	14 Orang
5	Eselon IV a.	50 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>68 Orang</b>

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Strata-3	- Orang
2	Strata-2	9 Orang
3	Strata-1	82 Orang
4	Diploma-4	2 Orang
5	Diploma-3	13 Orang
6	Diploma-2	- Orang
7	Diploma-1	- Orang
8	SLTA	61 Orang
9	SLTP	7 Orang
10	SD	- Orang



**Menurut Pendidikan :**

Sumber daya terkait Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja, terutama di era globalisasi yang semakin maju diharapkan pengembangan penggunaan teknologi informasi dapat diterapkan dengan optimal untuk mempermudah pelayanan yang prima kepada publik.

**d) Kinerja Pelayanan**

PAD merupakan poster besar kedua setelah Dana Perimbangan dalam kerangka Pendapatan Daerah. Penguatan PAD terus diupayakan setiap tahunnya melalui program/kegiatan strategis. Hal ini untuk meningkatkan kemandirian daerah Kalimantan Tengah namun tanpa melepaskan peranan pemerintah pusat (yang melalui Dana Perimbangan) dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir performance tersebut tampak pada table berikut ini:

**TABEL 2.3**  
**Perkembangan Target dan Realisasi PAD**  
**Provinsi Kalimantan Tengah,**  
**TA .2008 s.d 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2009 audited	188.969.200.600	215.715.647.347,91	114,15
2010 audited	539.925.444.000	511.631.235.577,47	94,76
2011 audited	654.805.150.000	832.901.340.654,07	127,20
2012 audited	748.307.996.917	945.362.708.230,26	126,33
2013 audited	1.046.981.744.984,	1.093.821.486.342.18	104,47
2014 audited	1.245.234.939.072,	1.254.008.372.296,09	100,70
2015 audited	3.370.090.492.755,	1.174.969.266.556,62	85,76
2016 audited	1.233.094.359.800,	1.158.303.928.014,48	93,93
2017 audited	1.342.494.134.000.	1.342.330.618.184,76	99,99
2018 un-audited	1.400.710.256.900,		

Dengan adanya regulasi berupa Perda dan Pergub yang mengatur tentang pendapatan daerah yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peluang untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru lebih terbuka, walaupun secara substansial masih ada pembatasan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi utama yang dimiliki daerah.

Dalam mencari alternative pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan

berbagai upaya menemukan potensi-potensi baru yang sesuai dengan kondisi daerah, terlebih lagi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang tengah berkembang dengan mobilitas modal dan penduduk yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka panjang peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan akan semakin signifikan.

Selama 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir target dan realisasi Pendapatan Daerah berfluktuasi secara normal, namun jika dibandingkan dengan potensi yang ada masih belum tergalai secara optimal, dan untuk mengetahui seberapa besar Peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table berikut ini:

**TABEL 2.4**  
**Peranan Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2009 s.d 2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	1.572.965.939.965,00	1.367.412.136.149,02	86,93
2010	1.636.477.647.000,00	1.563.654.255.922,47	95,55
2011	1.712.570.051.000,00	1.928.669.651.939,07	112,62
2012	2.260.466.375.417,00	2.514.031.289.315,78	111,22
2013	2.730.451.500.000,00	2.809.096.138.861,17	102,88
2014	3.164.139.120.000,00	3.129.694.746.217,76	98,91
2015	3.545.258.447.305,51	3.252.747.346.089,82	91,75
2016	3.427.236.875.000,00	3.548.504.589.637,35	103,54
2017	4.044.933.818.706,00	4.099.345.651.190,70	101,35

2018	4.412.108.656.600,00		
------	----------------------	--	--

Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 telah mengalami penguatan yang fluktuatif namun cukup meningkat.

Dalam hal Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber Dana Perimbangan dari sektor-sektor unggulan yaitu antara lain Sektor Kehutanan dan Pertambangan. Penerimaan Dana Perimbangan dari kedua sector ini berupa Bagi Hasil Sumber Daya Alam yaitu dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan, *Landrent* dan *Royalty* yang menjadi sumber Pendapatan Daerah potensial bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian pula untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana sector ini memberikan kontribusi PBB terbesar dibandingkan sektor-sektorlain nya.

Untuk melihat gambaran target dan realisasi Dana Perimbangan yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir dapat dilihat pada table berikut ini:

**TABEL 2.5**  
**Target dan RealisasiPenerimaan Dana Perimbangan**  
**Tahun Anggaran 2009 s.d 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	1.026.558.939.965,	913.061.727.054,	88,94

2010	961.086.975.000,	921.225.167.161,	95,85
2011	1.032.711.330.000,	1.083.088.116.046,	104,88
2012	1.234.620.348.000,	1.267.769.846.415,	102,68
2013	1.406.916.250.000,	1.442.477.673.796,	102,53
2014	1.604.443.273.500,	1.557.416.499.094,	97,07
2015	1.781.104.358.504,51	1.673.376.686.956,	93,95
2016	2.172.424.105.200,	2.357.667.493.709,	108,53 %
2017	2.701.314.884.706,	2.729.105.706.238,	101,03 %
2018	3.006.943.600.000,		

Pencapaian target dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak memang menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun Penerimaan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam relative menurun, hal ini disebabkan karena penerimaan Bagi Hasil Sektor Kehutanan potensinya semakin menurun. Demikian juga untuk sektor pertambangan upaya investasi di bidang itu cukup meningkat.

Diharapkan seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran signifikan PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah harus digerakkan dengan lebih cermat. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam langkah kedepan mengupayakan dengan berbagai strategi untuk mengoptimalkan potensi terkait.

Sampai dengan akhir 2017 standar pelayanan publik pada UPTB sudah berjalan dengan baik dan kedepan akan semakin ditingkatkan. Untuk menunjang pelayanan publik yang baik, sudah dilaksanakan program peningkatan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan pada UPTB se-Kalimantan Tengah, seperti pengembangan/peningkatan sistem komputerisasi dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan Samsat Keliling

e) **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.
- 2) Masih relative rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah.
- 3) Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 4) Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan *lifest afbyle* (gayah idup) masyarakat yang semakin sadar teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan.

Selain adanya tantangan tersebut di atas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya jaringan pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
- 2) Banyaknya asset daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- 3) Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan asset daerah.

**b) Penyajian Hasil Penelitian**

Badan Pendapatan Daerah atau dulu dikenal dengan Dinas Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai sumber seperti pajak, retribusi dan sebagainya sebagai pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan SKPD yang bertugas dalam mengelola pendapatan daerah dengan koordinasi dengan pemerintah daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur.

Dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah harus didukung dengan regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan penyempurnaan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan pencapaian target, minimalisasi praktek-praktek yang berakibat terhadap kebocoran potensi daerah dan kerugian terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang efektif dibutuhkan perencanaan strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), kesesuaian kebijakan, pengalokasian sumber daya dan pendanaannya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Dengan adanya regulasi berupa Perda dan Pergub yang mengatur tentang pendapatan daerah yang mengacu pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peluang untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru lebih terbuka, walaupun secara substansial masih ada pembatasan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi utama yang dimiliki daerah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Dalam mencari alternatif pengembangan Pendapatan Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya menemukan potensi-potensi baru yang sesuai dengan kondisi daerah, terlebih lagi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang tengah berkembang dengan mobilitas modal dan penduduk yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka panjang peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan akan semakin signifikan. Pendapatan daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 telah mengalami penguatan kenaikan yang terus meningkat.

Untuk mengetahui bagaimana strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah maka peneliti melakukan pendalaman penelitian berupa wawancara secara mendalam dengan pihak terkait untuk dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif.

### **1) Optimalisasi Pajak Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat**

Berbagai kajian menyebutkan bahwa salah satu yang mampu memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan diberlakukannya pajak yang mana tujuan penting dari pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Salah satunya bias kita katakan pajak daerah. Di Kalimantan Tengah yang paling bertanggung jawab dalam mengelola pajak daerah adalah Badan

Pendapatan Daerah atau biasa disingkat Bapenda. Bapenda bertugas mengelola pajak daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan umum seperti Pendidikan, Kesehatan dan sosial. Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Kalimantan Tengah, untuk mengetahui optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak Bapenda untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga hasil penelitian akan jauh lebih akurat. Wawancara pertama dengan Bapak Robert Coven (Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah) mengenai strategi optimalisasi pajak daerah sebagai berikut :

“Strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, misalnya menggunakan pendekatan social untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak, memperkuat regulasi untuk mendukung dan mempermudah penagihan, melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, dan lain sebagainya, membentuk Tim terpadu untuk melakukan sistem jempit bola dalam menagih pajak perusahaan - perusahaan yang operasionalnya banyak mempergunakan alat berat maupun kendaraan operasional lainnya.

“Melakukan Ektensifikasi yang dimulaidari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang kendaraan operasionalnya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar. Melakukan Intensifikasi yaitu dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pem pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah:

“Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah yang melibatkan instansi terkait untuk melakukan penagihan maupun kegiatan razia bersama. Membuat berbagai kebijakan pendukung sebagai upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, misalnya menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang pembebasan denda dan bunga pajak bagi kendaraan yang menunggak. Melakukan inovasi – inovasibaru yang berbasis penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>63</sup>

Menurut bapak Robert salah satu strategi dalam mengoptimalkan pajak daerah adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, misalnya menggunakan pendekatan social untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak, memperkuat regulasi untuk mendukung dan mempermudah penagihan, melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Selain itu juga dilakukan jemput bola oleh tim terpadu sehingga target yang telah ditetapkan dalam terealisasi dengan baik.

Informasi diatas juga diamini oleh ibu Putirta, SE, M.Si (Kasubid Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah) bahwa Langkah yang dilakukan adalah dengan jemput bola terutama perusahaan swasta yang beroperasi di Kalimantan Tengah sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan bapak Robert Senin, 21 April 2020

“Ada banyak cara mengoptimisasi pendapatan daerah harus bias menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. Lalu harus punya regulasi yang tepat dan kuat untuk mendukung aturan dalam penagihan. Membuat Tim terpadu untuk menagih pajak perusahaan skala besar yang dalam operasionalnya banyak mempergunakan alat berat/besar maupun kendaraan operasional lainnya karena penggunaannya di dalam lokasi perusahaan jauh dari perkotaan maka perlu di datangi untuk melakukan pendataan dan penagihan. Ada banyak strategi yang dilakukan Bapenda selama ini antara lain Membuan Tim optimalisasi yang melibatkan instansi terkait untuk melakukan penagihan dan rajia. Membuat pergub pembebasan denda dan bunga pajak bagi kendaraan yang menunggak dan membuat pembebasan biaya BBN II untuk kendaraan yang mutasi dari non KH ke – KH”.<sup>64</sup>

Menurut beberapa narasumber yang tidak mau disebutkan namanya dalam penelitian ini bahwa Langkah atau strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti: PKB dan BBN-KN, Pajak Rokok, PAP dan PBB-KB. Semua itu dilakukan agar pendapatan daerah semakin meningkat dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Jadi, dari wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi optimalisasi pendapatan asli daerah adalah dengan memperkuat regulasi, melakukan pendekatan sosial dan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti: PKB dan BBN-KN, Pajak Rokok, PAP dan PBB-KB.

Sumber-Sumber Pajak dan Retribusi Daerah

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ibu PutirtaRabu, 23 April 2020

Selanjutnya peneliti melakukan penggalian data kembali dengan wawancara berkaitan dengan apa saja sumber-sumber pajak daerah di Kalimantan Tengah. Sumber-sumber pajak di Kalimantan Tengah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Di bawah ini kutipan wawancara dengan bapak Robert :

“Kalau pajak daerah itu sudah ditentukan oleh pemerintah daerah melalui perda. Di Kalimantan Tengah sumber-sumber pajak daerah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Rata-rata pajak setiap daerah sama. Pajak daerah ini juga menjadi pendapat daerah untuk digunakan lagi untuk pembangunan.”<sup>65</sup>

Sedangkan untuk sumber-sumber Retribusi beliau menjelaskan bahwa sumber retribusi sesuai dengan perda no 3 tahun 2019 adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Berikut kutipannya :

“Di Kalteng retribusi kita seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Retribusi ini sesuai dengan perda terbaru yakni perda no 3 tahun 2019.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan bapak Robert Senin, 21 April 2020

<sup>66</sup>Ibid,

Jadi dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber-sumber pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Sedangkan sumber retribusi terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.

#### Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang haram pun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Agar mendapatkan informasi yang valid apakah pajak daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendapatan

mereka, kesempatan kerja dan peningkatan layanan umum pemerintah maka peneliti melakukan penggalan data dengan wawancara bersama masyarakat. Selain itu pula peneliti melakukan kombinasi data berupa pengamatan di lapangan apakah pajak mampu mendorong masyarakat semakin sejahtera khususnya di Palangka Raya Kalimantan Tengah sebagai sampel dari propinsi.

Wawancara pertama dengan Bapak MS yang bekerja sebagai pedagang di pasar berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dari pajak daerah :

“Saya sebagai pedagang di pasar sangat merasakan bahwa setiap tahun mulai dari 2016 ada peningkatan pendapatan. Masyarakat ramai belanja di pasar ini. Nah karena ramai maka penghasilan saya pun bertambah. Alhamdulillah cukup untuk menghidupi anak dan keluarga. Saya kira mungkin juga karena pajak yang dipungut oleh pemerintah lalu dikembalikan lagi kemasyarakat.”<sup>67</sup>

Menurut bapak MS bahwa pendapatan mereka meningkat sejak tahun 2016 silam. Mereka merasakan bahwa masyarakat ramai belanja. Menurut beliau mungkin ini dari dampak meningkatnya pajak daerah sebagai sumber penghasilan pemerintah.

Lalu juga wawancara dengan ibu ER yang suaminya sebagai buruh bangunan juga merasakan dengan pajak daerah maka banyak kegiatan proyek pemerintah sehingga suaminya memiliki pendapatan yang meningkat dari sebelumnya. Berikut kutipan wawancara :

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan bapak MS Kamis, 24 April 2020

“Kalau saya sih selaku masyarakat kan bekerja swasta. Kami kan biasanya jualan aja. Kadang dapat banyak kadang juga cumin balik modal. Selama beberapa tahun ini sih alhamdulillah pendapatan saya cukup buat sekolah anak. Mungkin juga karena banyak bayar pajak jadi banyak proyekkan.”<sup>68</sup>

Wawancara kedua dengan Bapak MS berkaitan dengan pajak daerah dalam memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat menurut bapak MS bahwa dengan meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak maka pemerintah punya modal untuk membangun. Dengan banyaknya pembangunan maka meningkat pula peluang pekerjaan.

Berikut wawancara dengan bapak MS:

“Saya sih kurang paham dek ya masalah itu. Tapi menurut saya dengan pajak yang meningkat maka daerah punya modal untuk membangun. Jadi dengan pembangunan maka pemerintah membuat proyek-proyek dan itu bisa memberikan peluang untuk bekerja khususnya bagi buruh dan pedagang. Mungkitupendapatsaya.”<sup>69</sup>

Lalu pendapat diatas diperjelas juga oleh ibu ER bahwa karena banyak proyek maka suaminya mendapatkan tawaran pekerjaan yang cukup banyak. Jadi otomatis suami beliau tidak menganggur karena banyak lapangan pekerjaan. Kutipann wawancara dengan beliau :

“Nah suami saya kan buruh tukang. Selama ini alhamdulillah banyak aja pekerjaanya. Katanya banyak proyek propinsi. Nah karena banyak proyek suami saya kan tidak menganggur. Jadi alhamdulillah banyak aja lapangan kerjaan sekarang ini.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan ibu ER Kamis, 24 April 2020

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak MS Kamis, 24 April 2020

<sup>70</sup>Wawancara dengan ibu ER Kamis, 24 April 2020



Wawancara ketiga dengan bapak MS berkaitan dengan pajak daerah terhadap peningkatan layanan Kesehatan. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“Ya semua kan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah memberkan gaji pegawai, program kerja dan sebagainya kalau tidak dari pajak. Nah pajak daerah juga membantu meningkatkan layanan Kesehatan kan. Jalan-jalan juga kan semakin bagus kalau banyak yang bayar pajak buat pembangunan kita.”<sup>71</sup>

Pendapat yang mirip juga diungkapkan oleh ibu EN bahwa dengan adanya pajak daerah maka layanan Kesehatan gratis didapatkan oleh pemerintah daerah. Selain itu keluarga juga merasa tenang karena diberikan kartu BPJS Kesehatan. Berikut kutipan wawancara dengan beliau :

“Kalau sayasih bersyukur suami bekerja dikasih BPJS Kesehatan sama ketenaga kerjaan. Dengan ada nya kartu itu maka kami bisa mendapatkan layanan Kesehatan gratis di puskesmas. Saya sih berterimakasih pada pemerintah yang membuat program dan membayar iuran Kesehatan kami.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dimana pendapatan masyarakat semakin meningkat, lapangan pekerjaan tersedia dan juga layanan umum seperti Kesehatan dan Pendidikan yang semakin baik. Hal ini dirasakan sendiri oleh masyarakat.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak MS Kamis, 24 April 2020

## 2) Kesesuaian Pajak Daerah dengan Harapan Masyarakat

Pajak merupakan kekayaan negara bersumber dari rakyat yang sudah barang tentu tujuannya untuk semata-mata kemakmuran rakyat. Pajak diharapkan mampu memberikan dampak yang luas bagi seluruh rakyat. Diharapkan pajak mampu meningkatkan harapan hidup dan juga menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat.

Kesesuaian pajak daerah dimungkinkan terpenuhinya harapan masyarakat terhadap kontribusi pajak yang dikeluarkan. Setiap masyarakat tentu berharap setiap rupiah uang yang dikeluarkan dapat memberikan dampak bagi pembangunan. Dengan pembangunan yang berkemajuan maka rakyat juga semakin sejahtera sesuai dengan harapan mereka.

Memahami hal di atas maka dilakukan pendalaman penelitian dengan berbagai pihak terutama Dispenda Kalimantan Tengah untuk melihat sejauh mana pajak dapat memenuhi harapan masyarakat secara umum.

Wawancara pertama dengan Bapak Robert Kabid Retribusi dan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama ini sudah cukup maksimal dalam menggali potensi pajak daerah, namun tentu saja perlu dilakukan pembenahan dan penyempurnaan terkait

dengan pelayanan kepada masyarakat agar bias memberikan layanan publik yang prima bagi masyarakat”.<sup>72</sup>

Ibu Putirta Kasubid Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“Kalau menurut saya usaha dari Bapenda selama ini cukup maksimal dalam menggali potensi pajak daerah namun terkendala, banyak kendala yang dihadapi terutama masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak”.<sup>73</sup>

Doni Sselaku pelaksana Bapenda juga mengatakan bahwa pajak sudah sesuai dengan harapan masyarakat :

“Menurut saya usaha sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan harapan masyarakat, karena pajak yang dipungut diluruh UPTPPD/Samsat di Kab.Kota disetor kekas daerah dan dipergunakan untuk keperluan daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah”.<sup>74</sup>

Jadi dari pendapat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pajak daerah dipungut semata-mata untuk pembangunan Kalimantan Tengah dan semua itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan pajak pun dilakukan dengan sangat baik. Namun catatan yang harus dibenahi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

### 3) Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan Layanan

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak DonisSelasa, 22 April 2020

<sup>73</sup>Wawancara dengan ibu Putirta Rabu, 23 April 2020

<sup>74</sup>Wawancara dengan bapak Donisselasa, 22 April 2020

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang murni didapatkan di daerah masing-masing dengan segala potensi yang dimiliki. Semakin baik tata Kelola daerah maka semakin baik pula pendapatan daerah atau mungkin pendapatan daerah semakin meningkat. PAD juga salah satu indicator keberhasilan daerah dalam mengelola pemerintahan daerah. PAD mampu membuat daerah semakin mandiri tanpa bergantung terus kepada pemerintah pusat.

PAD daerah ini diharapkan semakin baik dan juga searah dengan peningkatan layanan yang baik oleh Dispenda Kalimantan Tengah. Pelayanan yang optimal tentu berujung pada meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga berkontribusi bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Mengetahui sejauh mana pendapatan asli daerah terhadap peningkatan layanan maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak dispenda dengan tujuan dapat memberikan informasi dan gambaran yang baik terhadap PAD dan peningkatan layanan.

Wawancara dilakukan Bapak Robert Kabid Retribusi dan Pendapatan Pajak Daerah tentang PAD dan Peningkatan Layanan sebagai berikut :

“Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena

merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah, Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara professional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stake holder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat. Tentu untuk memenuhi tingkat pelayanan yang paripurna dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah digambarkan secara proporsional dalam APBD sesuai dengan prosentase minimal dalam penganggaran.<sup>75</sup>

Pendapat Bapak Robert dapat kita pahami bahwa kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Beliau menambahkan apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara professional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stake holder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat. Tentu untuk memenuhi tingkat pelayanan yang paripurna dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah ungkap beliau.

Kemudian ibu Putirta, SE, M. Siselaku Kasubid Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah menambahkan dispenda pasti mampu melakukan tata kelola yang baik dengan

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan bapak Robert senin, 21 April 2020

mengutamakan kepentingan masyarakat terutama pada layanan Pendidikan, Kesehatan dan social ekonomi.

“Pasti mampu asal dikelola dengan baik dan harus dicermati secara skala prioritas yang diutamakan untuk kepentingan yang bias meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. PAD merupakan pendapatan murni dari daerah yang tujuannya juga untuk daerah tersebut seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan social ekonomi lainnya”.<sup>76</sup>

Donis selaku pelaksana di Bapenda Kalimantan Tengah juga menambahkan bahwa PAD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah asal kan kesadaran masyarakat aktif mau bayar pajak dan tidak nunggak terutama para pengusaha yang ada di Kalimantan Tengah. Berikut kutipan wawancara dengan beliau :

“Menurut saya PAD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah asalkan kesadaran masyarakat aktif mau bayar pajak dan tidak nunggak terutama para pengusaha yang ada di Kalimantan Tengah ini”.<sup>77</sup>

Kesimpulan dari beberapa informan diatas dapat kita simpulkan bahwa kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Beliau menambahkan apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara professional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan ibu Putirta Rabu, 23 April 2020

<sup>77</sup>Wawancara dengan bapak Donis Selasa, 22 April 2020

kemauan yang kuat dari seluruh stake holder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

#### 4) Faktor Pendukung dan Penghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah kegiatan atau visi organisasi. Yang menentukan keberhasilan biasa disebut factor pendukung dimana factor ini berkontribusi pada tercapainya visi misi sebuah organisasi. Sedangkan yang membuat gagal biasa kita sebut factor penghambat. Factor ini menjadi penghalang bagi tercapainya visi-misi organisasi yang harusnya diantisipasi sedemikian rupa.

Robert Selaku Kabid Retribusi dan Pajak Daerah berpendapat bahwa factor pendukung dari visi misi dispenda adalah adanya dukungan dari pimpinan, potensi yang sangat besar serta wilayah yang cukup luas membuat kita optimis bahwa PAD mampu digali seoptimal mungkin. Berikut kutipan wawancara dengan beliau :

“Adanya dukungan penuh dari unsure pimpinan di daerah seperti Gubernur Kalimantan Tengah yang ikut bergerak dalam upaya-upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, adanya potensi yang masih banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal, memiliki luas wilayah yang cukup besar dan sumber daya alam yang berlimpah,

adanya regulasi yang jelas dan mendukung dan memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai.<sup>78</sup>

Kemudian beliau juga menjelaskan :

“Belum validnya data terkait potensi pajak daerah dan data wajib pajak. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membayar pajak. perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah masih ditemukan belum transparan dalam memberikan data alat operasional seperti kendaraan alat berat dan kendaraan bermotor serta pemakaian BBM dan pemakaian Air Permukaan yang berkenaan dengan pembayaran pajak . kurang biaya operasional dan tenaga SDM untuk mendatangi perusahaan – perusahaan yang berdomisili jauh terkait keadaan geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas dan sulit untuk dijangkau”. (Sumber : Kutipan Wawancara Diolah Sendiri)

Ibu

“Faktor Pendukung adalah potensi yang sangat banyak dan belum biasa dikelola dengan baik menyangkut keadaan alam yang berpotensi. Untuk dijadikan daerah wisata yang menarik bagi wisatawan. Hasil alam dan hutan yang berlimpah . Adanya Regulasi yang mendukung dalam membuat bias mengembangkan peningkatan. Banyak orang pintar yang memiliki SDM yang mapan dan mampu ikut bias mengembangkan peningkatan. Penerimaan daerah. Dan Wilayah/Daerah kuta yang berpotensi untuk menarik minat para investor local maupun asing.<sup>79</sup>

Sedangkan factor penghambat menurut Robert adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan perusahaan di Kalimantan Tengah cenderung tertutup dan tidak transparan. Selain dispenda belum memiliki anggaran khusus untuk

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan bapak Robert Senin, 21 April 2020

<sup>79</sup>Wawancara dengan bapak Robert Senin, 21 April 2020



dating langsung kelokasi operasional perusahaan. Berikut kutipannya :

“Sedangkan factor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karna terbuktiutuk Pajak Kendaraan Bermotor dari data yang ada hanya kurang lebih 40 % saja yang aktif membayar. Lalu perusahaan yang operasional di Kalimantan Tengah ada yang tidak transparan dalam memberikan data alat operasional seperti kendaraan alat berat dan kendaraan bermotor serta pemakaian BBM dan pemakaian Air Permukaan yang berkenaan dengan pembayaran pajak .Terakhir kurangnya tenaga dan biaya untuk mendatangi perusahaan- perusahaan yang berdomisili jauh terkait keadaan teritorial wilayah kita yang sangat luas dan sulit untuk dijangkau”. ( Sumber : Kutipan Wawancara Diolah Sendiri)<sup>80</sup>

Donis selaku pelaksana menambahkan Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Pergub yang sudah ditetapkan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan. Sedangkan factor penghambat seperti kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kesadaran masyarakat membayar pajak kurang aktif sehingga terjadi tunggakan pajak tiap tahunnya meningkat drastis dan kurangnya Personil petugas lapangan untuk menagih pajak yang menunggak. Berikut kutipannya :

“Faktor Pendukung adalah Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Pergub yang sudah ditetapkan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan. Sedangkan factor penghambat seperti kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kesadaran masyarakat membayar pajak kurang aktif sehingga terjadi tunggakan pajak tiap tahunnya meningkat drastis dan kurangnya Personil petugas lapangan untuk

---

<sup>80</sup>Ibid,

menagih pajak yang menunggak". (Sumber : Kutipan Wawancara Diolah Sendiri)<sup>81</sup>

Dari pendapat informasi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi factor pendukung dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah adalah adanya dukungan dari pimpinan, potensi yang sangat besar serta wilayah yang cukup luas membuat kita optimis bahwa PAD mampu digali seoptimal mungkin. Sedangkan factor penghambatnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan perusahaan di Kalimantan Tengah cenderung tertutup dan tidak transparan. Selain dispenda belum memiliki anggaran khusus untuk datang langsung kelokasi operasional perusahaan.

---

<sup>81</sup>WawancaradenganbapakDonisselasa, 22 April 2020

## B. Pembahasan

1. Strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah

Strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a) Pajak daerah bias berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kedaerah sebagai pajak daerah.
- b) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- d) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsure pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tariff pajak daerah. Salah satu yang mendongkrak pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang bersumber dari daerah administrasi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta transfer dari pemerintah pusat atas bagi hasil yang disepakati sesuai undang-undang. Untuk itu maka diperlukan strategi bagaimana mengoptimalkan pajak daerah yang nantinya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu pula yang menjadi focus pemerintah daerah terutama oleh gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik benang merah sebagai simpulan atas hasil analisis bahwa pertama strategi optimalisasi pendapatan asli daerah adalah dengan memperkuat regulasi, melakukan pendekatan sosial dan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti : PKB dan BBN-KN, Pajak Rokok, PAP dan PBB-KB.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah. Pertama. Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan seberapa pendapatan yang mereka terima.

*Kedua*, Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. *Ketiga* adalah peningkatan layanan umum masyarakat seperti Kesehatan, Pendidikan dan sosial.

Memperkuat regulasi adalah dengan dibuatkan peraturan daerah (perda) berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah dan PAD daerah, regulasi ini diharapkan mempermudah pihak pemerintah terutama dispenda dalam

menjalankan tugas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi. Regulasi diharapkan mampu menjembatani antara pemerintah dan pelaku usaha atau masyarakat itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dan dengan pendekatan sosial maka masyarakat akan sadar dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

Kedua, pajak daerah dipungut semata-mata untuk pembangunan Kalimantan Tengah dan semua itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan pajak pun dilakukan dengan sangat baik. Namun catatan yang harus dibenahi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus terus dilakukan. Selain itu pemerintah daerah juga memberikan stimulus bagi pembayar pajak berupa penghapusan denda bagi yang terlambat dalam membayar pajak. Tentu apabila kesadaran ini terus dibangun maka pajak daerah mampu memberikan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan layanan oleh pemerintah akibat dari meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah itu sendiri.

Ketiga, kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka akan dapat menumbuhkan daya saing

daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Ke empat sumber-sumber pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bisa Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Sedangkan sumber retribusi terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ KalawaAtei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Kelima ditemukan bahwa pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dimana pendapatan masyarakat semakin meningkat, lapangan pekerjaan tersedia dan juga layanan umum seperti Kesehatan dan Pendidikan yang semakin baik. Hal ini dirasakan sendiri oleh masyarakat.

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Sehingga secara teori Islam bahwa semua pihak harus berlaku adil khususnya pemerintah daerah dengan menyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan masyarakat itu pula sesuai dengan Q.S Al-Hadid ayat 25 tentang keadilan dan manfaat dari besi (kebijaksanaan) bagi umat manusia , Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ  
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sesungguhnya, kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai Kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat Maha perkasa.*<sup>82</sup>

Dalam sistem ekonomi islam tidak dikenal pajak, sumber penerimaan negara yang mirip dengan pajak dikenal dengan nama dharibah yang artinya adalah beban. *Dharibah* disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang hamper mirip dengan pajak. (Gusfahmi.2007).<sup>83</sup> jadi secara hukum Islam bahwa pajak daerah boleh dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum seperti penyediaan fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Hal ini juga sesuai dengan teori kesejahteraan social bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan yang

<sup>82</sup>Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 25 Terbitan Al-Qur'an Ku DenganTajwid Blok WarnaDisertaiTerjemah

<sup>83</sup>Gusfahmi, *PajakMenurutSyari'ah*.Jakarta: Rajawali press, 2007, h. 56



optimal bagi sepenuhnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bisa dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari rakyat itu sendiri.

Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”<sup>84</sup>

1) Faktor pendukung dan penghambat pendapatan pajak daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi factor pendukung dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah adalah adanya dukungan dari pimpinan, potensi yang sangat besar serta wilayah yang cukup luas membuat kita optimis bahwa PAD mampu digali seoptimal mungkin. Sedangkan factor penghambatnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan perusahaan di Kalimantan Tengah cenderung tertutup dan tidak transparan. Selain dispenda belum memiliki anggaran khusus untuk dating langsung kelokasi operasional perusahaan.

---

<sup>84</sup>Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, h. 173

Dukungan pimpinan merupakan syarat dari berhasilnya sebuah kegiatan. Pimpinan selaku orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi adalah seorang yang memiliki visi besar yang sepatutnya harus mendorong dan memotivasi bawahannya untuk terus berinovasi. Di Dispenda itu sendiri para pelaksana sangat merasakan bahwa dukungan pimpinan mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan kepala dinas itu sendiri sangat besar agar pajak daerah harus terus dapat digali sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum di Kalimantan Tengah. Kedua adalah potensi. Dengan wilayah terbesar kedua di Indonesia maka sepiantasnya Kalimantan Tengah menjadi daerah yang memiliki PAD yang tinggi melalui pajak daerah. Oleh karenanya maka potensi ini harus terus digali, direncanakan serta dieksekusi dengan baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut :

- 1) Strategi optimalisasi pendapatan asli daerah adalah dengan memperkuat regulasi, melakukan pendekatan sosial dan memaksimalkan upaya peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak, seperti : PKB dan BBN-KN, Pajak Rokok, PAP dan PBB-KB. Sumber-sumber pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bisa Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok. Sedangkan sumber retribusi terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ KalawaAtei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kalimantan Tengah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Selain itu pajak daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dimana pendapatan masyarakat semakin meningkat, lapangan pekerjaan tersedia dan juga layanan umum seperti Kesehatan dan Pendidikan yang semakin baik. Hal ini dirasakan sendiri oleh masyarakat.
- 2) Faktor pendukung dispenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah adalah adanya dukungan dari pimpinan, potensi yang sangat besar

serta wilayah yang cukup luas membuat optimis bahwa PAD mampu digali seoptimal mungkin. Sedangkan factor penghambatnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan perusahaan di Kalimantan Tengah cenderung tertutup dan tidak transparan. Selain itu dispenda belum memiliki anggaran khusus untuk dating langsung kelokasi operasional perusahaan.

## **B. Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian ini :

- 1) Kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah (dispenda) agar terus meningkatkan upaya kolaborasi antar sektor untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah yang berlaku. Selain itu dispenda harusnya terus berinovasi dengan memberikan pelayanan pajak daerah dengan menggunakan aplikasi atau IT yang memudahkan masyarakat membayar pajak dan sebagainya.
- 2) Untuk peneliti lain agar bisa melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pendekatan penelitian.
- 3) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetk maupun media elektronik.

Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk dipinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjeskan pentingnya pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

### e) Buku/Jurnal/Skripsi/Tesis

Adisasmita, Rahardja, 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha, Yogyakarta

Amin Suma, Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah dan Tafsir*, Jakarta, Bumi Aksara

Badrudin, Rudi, 2011, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta

Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999)

Bubolzdan Sontag, 1993. argue that Richards's vision of a scientifically based, family consumption unit missed the fact that family decisions ultimately reflect. USA

Curri van, 1999; Lambert *et al.*, 2001; Robbins dan Judge, 2007. he Causal Order of Job Satisfaction and Organizational. Commitment in Models of Employee Turnover. Human Resource. Management .

Dade Kusuma, Raden, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 1997/1998-2002, ( Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, bahan tidak diterbitkan, 2004)

Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Gusfahmi, 2001, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Rajawali Pers

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: Rajawali press

Halim, Abdul, 2001 *Akutansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasani, Akrom, “*Analisis Periode Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008*”. ( Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2010

Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Pemerintah Daerah, 2015, Pustaka Mahardika, Yogyakarta

- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Edisi pertama, Jakarta
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PTGrafindo
- Kuncoro, 2006, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Erlangga
- LincolnArsyad, 2015, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2011, *perpajakan* ,Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta
- Milles dan Huberman, 1999, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemah Tjetjep Rohendi, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosda karya. Offset, Bandung
- Munandar, Aris , *Strategi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Aspek Pajak Kendaraan Bermotor* ( Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, bahan tidak diterbitkan, 2012)
- Qordhawi, Yusuf, 2004, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Perss, Jakarta
- RahardjoAdisasmita, 2013, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramdhani, Firman, *Analisa Administrasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Daerah ( Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)*, ( Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, bahan tidak diterbitkan, 2003)
- Robinson Tarigan, 2005, *Ekonomi Regional*: PTBumi Aksara, Jakarta
- Robinson Tarigan, 2014, *Ekonomi Regional edisi Revisi* ( Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Robinson Tarigan, 2014, *Ekonomi Regional; Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, Jakarta; Bumi Aksara

- Sari, Juwita, Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Mamuju ( Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mamuju, 2018)
- Sayogyo, 1984. Kemiskinan dan ketimpangan Sosial IPB Press
- Sharpe, 2004. Journal of Empirical Finance, Vol 1, Issue 1, January 2004, pp 29-53. Effendy, R. N. P, dan E.
- Simanjuntak, Robert A. 2002. Transfer Pusat keDaerah :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). 2002. Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, LPEM – FEUI, MPKP – FEUI, Dirjen PKPD. Jakarta : Kompas
- Siswandi, 2007. Ekonomi Pembangunan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiharto, 2007. Faktor-Faktor Resiko Hipertensi Grade II Pada. Masyarakat?. Tesis. Semarang :Universitas Diponegoro
- Sumarti, 1999. PersepsiKesejahteraan dan Tindakan Kolektif Orang Jawa.SekolahPascasarjana IPB
- Supriatna,1993,*system administrasi pemerintahan di daerah*, PT Bumi Aksara,Jakarta
- Tirta Sari, Maharani, 2018, OptimalisasiPemungutanPajak Daerah dalamrangkapeningatan PAD di Provinsi Lampung (Tesis, FakultasIlmuSosial dan IlmuPolitikUniversitas Lampung)
- Usman dan purnomo Setiadi Akbar, 2004.*Metodologi Penelitian Sosial*,. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Viethzalrivai, 2011,*ManajemenSumberDayaManusiauntuk Perusahaan*, RajaGrafindo,JakartaPersada,Jakarta
- Whithaker dan Federico, 1997. Social welfare in Today's World. Second Edition.
- Yuliati,2000, *Akutansi sektor public cetakan kelima*, salemba empat, Jakarta



**f) Surah Al-Qur'an**

Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 29 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah

Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun Ayat 72 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah

Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 11 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah

Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 10 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah

Kutipan Ayat Dari Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90 Terbitan Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah

